BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyusunan laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan penyusunan laporan keuangan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu stuktur, ditunjukan untuk mendorong dan meningkatkan dalam upaya mensejahterakan kehidupan bangsa. Demi terciptanya perkembangan laporan keuangan di Badan kepegawaian daerah (BKD) provinsi jawa barat yang handal dan mandiri,maka Badan kepegawain daerah Provinsi Jawa Barat yang sehat dan kuat harus di dorong oleh suatu kementrian usaha yang kokoh dan harus didukung oleh sumberdaya manusia yang beraktivitas produktif dan propesional.

Akuntansi didalam perusahaan ikut berperan untuk menyajikan penyusunan laporan keuangan, karena fungsi akuntansi yang mempunyai tugas mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dan akibat dari tansaksi-transaksi disebut terhadap aktiva-aktiva, utang, modal dan biaya-biaya dalam Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat tersebut, transaksi-transaksi tersebut dapat di kalsifikasikan, diikthisarkan dan di laporkan ke dalam laporan-laporan yang dinamakan laopran keuangan. Fase yang terkahir dalam akuntansi adalah menganalisakan dan menginterpresentasikan laporan keuangan.

Laporan keuangan harus dapat dijadikan laporan realisasi anggaran didalam penyusunan laporan keuangan, baik itu untuk menilai efesiensi, neraca, catatan laporan keuangan,rentabilitas dari perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 295 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat ini belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun *2010 Unaudited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun *2010 Unaudited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sistematika penulisan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat disajikan dengan berpedoman pada Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, kewenangan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota. Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No.

1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penyusunan laporan keuangan dimaksud mencakup:

1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari s.d. 31 Desember 2010).

Laporan Arus Kas di dalam Kepmendagri 29/2002 disebut Laporan Aliran Kas. Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus masuk/keluar kas ke/dari pemerintah daerah berikut saldo kas selama satu suatu peride tertentu. Dengan demikian dalam Laporan Arus kas ini tidak hanya disajikan keluar masuknya uang kdari/ke kas daerah tetapi juga mencakup kas yang sudah diterima oleh para bendahara penerimaan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul judul kuliah kerja praktek mengenai :

"TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT"

1.2 Maksud dan Tujuan

Kegiatan kuliah kerja praktek ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana cara penyusunan laporan keuangan pada Badan kepegawain daerah (BKD) Serta perhitungan analisis Laporan realisasi anggaran.

Adapun tujuan dari kuliah kerja praktek ini adalah untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Bagaimana kebijakan penyusunan laporan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat
2. Bagaimana prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang diterapkan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Sesuai dengan maksud dan tujuan yang tealah di uraikan di atas, maka penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaanya sebagai berikut :

1. Bagi penulis

   Sebagai tambahan pengetahuan mengenai bagaimana tinjauan atas laporan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat

2. Bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat

   Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak instansi dalam memperbaiki tinjauan atas laporan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat

3. Bagi Akademis

   a. Dapat menjadi tambahan referensi bagi lembaga guna penelitian selanjutnya serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi.

   b. Sebagai materi tambahan untuk evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

4. Bagi pihak lain

   Mengetahui tinjauan atas laporan keuangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sumber dapat memberikan pengetahuan dan dapat menjadi reverensi bagi pihak yang mengkaji topik – topik yang berkaitan dengan masalah bahasan dalam laporan.

1.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *full black release,* yaitu mengadakan penelitian dalam waktu saru periode tertentu. Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan kuliah kerja praktek adalah :

1. Studi pustaka *(library research)*

   Yaitu penelitian smber – sumber data dan informasi dari perpustakaan yang meliputi literature, karangan maupun tulisan, hasil kuliah, dan bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian penulisan.

2. Studi lapangan *(field research)*

   a. Praktek langsung

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

   b. Wawancara

      Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan para praktisi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat

1.5 Lokasi dan Waktu kuliah Kerja Praktek

Adapun perusahaan tempat penulis melaksanakan kuliah kerja praktek adalah di Badan Kepegawain Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan waktu pelaksanaan antara tanggal 4 Agustus sampai dengan 4 September 2011

Table 1.1
Jadwal kegiatan kerja praktek

NO	KEGIATAN	BULAN																											
		JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mengajukan Permohonan KP																												
2	Mencari Tempat KKP																												
3	Pelaksanaan KKP																												
4	Mengajukan judul																												
5	Mencari Data Laporan KP																												
6	Pengelolaan Data Laporan KP																												
7	Membuat Laporan KP																												
8	Bimbingan Laporan KP																												
	a. Judul																												
	b. BAB I																												
	c. BAB II																												
	d. BAB III																												
	e. BAB IV																												